

APAKAH SHELTER BUS BATIK SOLO TRANS AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS?

Endang Sri Wahyuni

Poltekkes Kemenkes Surakarta Jurusan Okupasi Terapi

Abstract

Background: Availability of facilities and infrastructure for public facilities that facilitate accessibility for people with disabilities is very important. The basic thing for increasing the independence of people with disabilities is the availability of adequate public service facilities. One of the supporting facilities to fulfill public facilities is the Batik Solo Trans bus shelter. The purpose of this study is to analyze the accessibility of people with disabilities in assessing the assistance of Trans Solo Batik buses in Surakarta City. **Method:** This type of research is explorative qualitative research. Methods of interviewing, observation, and documentation. Data is obtained through interviews with persons with physical and mental disabilities. The data analysis technique uses the triangulation method. **Results:** Persons with disabilities are still experiencing difficulties in accessing due to architectural barriers. Design shelter still does not meet established accessibility standards. **Conclusion:** Shelter Solo Trans Batik buses in Surakarta City are not accessible for people with disabilities. The limited accessibility for people with disabilities requires further study in a design that is in accordance with the principles of ergonomics and accessibility in order to accommodate the public interest in general and people with disabilities in particular.

Keywords: accessibility, disability, disabled, public services, shelter

PENDAHULUAN

Menurut *The International Classification of Functioning, Disability and Health/ICF* menyatakan bahwa difabel/disabilitas merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami kesulitan pada area fungsionalnya yang dipandang secara holistik dan terjadi karena adanya hubungan interaksi antara faktor personal, kontekstual, dan lingkungan (Hemmingsson and Jonsson, 2005). Kemandirian kaum difabel dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana fasilitas publik yang memenuhi kaidah aksesibilitas seperti adanya modifikasi lingkungan (Hurst, 2003; Imrie, 2004; Ueda and Okawa,

2003). Masalah mendasar bagi kaum difabel adalah kesulitan dalam mengakses layanan publik terutama pada bidang transportasi umum (Dwiyanto, 2008). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan arsitektural yang ada sehingga sulit diakses oleh kaum difabel yang mengakibatkan mereka kehilangan hak dalam memperoleh pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya (Tarsidi, 2008).

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2012), jumlah penyandang difabel di Kota Surakarta mencapai 1.237 orang yang terdiri dari 354 penyandang cacat fisik, 111 netra/buta, 193 cacat rungu/wicara, 311 cacat mental/jiwa, 70

cacat fisik dan mental, serta 198 cacat lainnya.

Sebenarnya pemerintah pun telah memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi kaum difabel yang diimplementasikan dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang kemudahan dalam aksesibilitas bagi kaum difabel serta UU No 25 Tahun 2009 yang mengatur dengan tegas tentang azas kemudahan aksesibilitas pada pelayanan publik bagi kaum difabel (Lembaga Negara RI, 2009). Hal tersebut didukung dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, KepMen Perhubungan RI No. KM. 71 tahun 1998 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. Pemerintah kota Surakarta pun telah memiliki Perda Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang kesetaraan warga difabel, akan tetapi kenyataannya ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari yang diharapkan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang ada.

Dari paparan tersebut, maka penelitian ini sangat penting dilakukan guna menganalisis lebih lanjut mengenai aksesibilitas shelter Batik Solo Trans bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang transportasi umum di Kota Surakarta. Fokus kajian aksesibilitas dilihat dari perspektif pengguna layanan (*user*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif menggunakan strategi pendekatan studi kasus. Kasus penelitian ini adalah kondisi pelayanan publik yang terkait dengan

aksesibilitas dan hambatan kaum difabel dalam mengakses shelter bus Batik Solo Trans. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data, metode dan teori. Informan penelitian ini adalah *user* atau pengguna jasa transportasi umum berupa bus Batik Solo Trans yang terdiri dari kaum difabel dengan cacat fisik, rungu/wicara, netra, dan mental) di Kota Surakarta.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik informan penelitian terdiri dari kaum difabel pengguna bus Solo Batik Trans dengan cacat fisik 3 orang, 2 rungu, 3 wicara, 3 netra, dan 2 mental. Usia informan sekitar 19-50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil *deep interview* terhadap informan, maka didapatkan hasil bahwa: ukuran pintu dari jalur lambat/trotoar menuju shelter bus sempit dan curam sehingga menyulitkan untuk kursi roda mengaksesnya, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa diakses karena tidak dilengkapi dengan ram yang memadai; material penyusun lantai shelter terbuat dari bahan keramik yang licin jika terkena air hujan dan berpotensi menyebabkan jatuh; ukuran ram yang tersedia sempit dan curam; ruang shelter belum memenuhi kaidah ukuran yang dianjurkan sehingga kurang luas, serta adanya keterbatasan rambu penanda dalam shelter seperti *running text* dan alarm.

PEMBAHASAN

1. Difabel fisik

Difabel fisik dengan kursi roda mengalami hambatan karena adanya

desain shelter yang belum memenuhi kaidah aksesibilitas sehingga kurang aman bahkan tidak dapat diakses. Tarsidi (2008) menyatakan bahwa pengguna kursi roda banyak mengalami hambatan dalam mobilitas karena adanya keterbatasan desain arsitektural. Public Disclosure Authorized (2013) memperkuat bahwa shelter dibuat cukup luas agar dapat memberi ruang gerak bagi kursi roda dan pengguna alat bantu jalan.

2. Difabel rungu/wicara
Hambatan fasilitas berupa adanya rambu petunjuk elektronik menjadi permasalahan bagi kaum difabel rungu/wicara. Hal ini didukung oleh pemaparan Ariyani (2010) yang menyatakan bahwa pemberian informasi pada difabel rungu dapat diberikan melalui indera visual berupa *running text*, bel peringatan kebakaran, lampu yang berkedip-kedip, serta gestur bahasa isyarat.
3. Difabel netra
Difabel netra terhambat karena keterbatasan design bangunan dan fasilitas penunjuk berupa audio dan taktil. Sejalan dengan Public Disclosure Authorized (2013) yang menyatakan bahwa untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan visual, dapat difasilitasi dengan pelayanan informasi taktil seperti *braille* atau *tactile sign* maupun *audible information* di tempat pemberhentian bus/terminal. Bagi yang menderita *low vision* dapat menggunakan informasi visual statik (tanda, stiker, dan poster) berukuran besar dan dapat terbaca dari kejauhan.
4. Difabel mental
Bagi difabel mental tidak mengalami hambatan karena bisa bertanya,

meniru, bahkan mencontoh perilaku orang lain saat mengalami kesulitan. Menurut Aryani (2010), faktor keselamatan merupakan hal utama bagi difabel mental sehingga membutuhkan bangunan bersudut tumpul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bangunan shelter belum memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan dan lingkungan seperti ukuran dasar ruang, pintu, ram, tangga, rambu, dan marka sesuai PERMEN PU No.30/PRT/M 2006. Shelter tidak aksesibel untuk kaum difabel.

Saran yang dapat diberikan adalah: adanya sistem pembangunan yang berpedoman pada *safety city* terutama bagi kaum difabel, melibatkan *public bisnis* untuk mewujudkan pembangunan pelayanan publik yang ramah dan aman bagi kaum difabel, adanya perencanaan kebijakan dan keputusan dalam pembangunan aksesibilitas lingkungan, serta melibatkan segala sektor masyarakat dan stekholder dalam pembangunan fasilitas publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aryani, D dan Rosinta, F. 2010. *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol.17. No.2.
- Dispendukcapil. 2012. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial. <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-04-43-55/kualitas-penduduk/item/33->

- [komposisipendudukmenurutkarakteristik sosial](#) Diakses 22 April 2014. 15.27 WIB
- Dwiyanto, A. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hemmingsson, H., & Jonsson, H. 2005. An Occupational Perspective on the Concept of Participation in the International Classification of Functioning, Disability and Health--Some Critical Remarks. *American Journal of Occupational Therapy*, 59(5), 569–576.
- Hurst, R. 2003. The International Disability Rights Movement and The ICF. *Disability and Rehabilitation*, 25(11-12), 572–576.
- Imrie, R. 2004. Demystifying Disability: A Review of The International Classification of Functioning, Disability and Health. *Sociology of Health & Illness*, 26(3), 287–305.
- Lembaga Negara RI. 1997. UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat
- Lembaga Negara RI. 2009. UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Menteri Pekerjaan Umum. 2006. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Menteri Perhubungan. 1998. Keputusan Menteri Perhubungan No KM 71 Tahun 1998 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Pemerintah Kota Surakarta. 2008. Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Warga Difabel
- Public Disclosure Authorized. 2013. Improving Accessibility to Transport for People with Limited Mobility (PLM). A Practical Guidance Note. Middle East and North Africa Region: Sustainable Development Department
- Tarsidi, D. 2008. *Peranan Orang Tua dalam Perkembangan Kompetensi Sosial Anak*. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
- Ueda, S., & Okawa, Y. (2003). The subjective dimension of functioning and disability: What is it and what is it for? *Disability and Rehabilitation*, 25(11-12), 596–6